

Urgensi Komunikasi Program Kampung KB di Kelurahan Pangungrejo Kota Pasuruan

The Urgency of Communication for the Family Planning Village Program in Pangungrejo Village, Pasuruan City

Ilmi Usrotin Choiriyah^{1*}, A'isyah Mutiara²

E-mail: ilmiusrotin@umsida.ac.id¹, aisyahmtr22@gmail.com²

^{1,2}Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

*corresponding author

Dikirimkan: 10-5-2022; Diterima: 8-12-2022; Diterbitkan: 12-12-2022

DOI: <https://doi.org/10.30996/jpap.v8i2.6516>

Abstract

The purpose of this study was to analyze and describe the Communication of the Kampung KB Program in Pangungrejo District, Pangungrejo Village, Pasuruan City. The research method used is descriptive qualitative. Data collection techniques through interviews, observations and documentation with selected informants using purposive sampling technique. The results showed that transmission between implementers and target groups was carried out directly through regular meetings and also indirectly via the What's App group. Clarity is done with the goals and objectives set. The purpose of the Kampung KB program is so that the Pangungrejo Village area, which previously had an image as a slum coastal area and lower human resources than other areas, could become even better. The target in the Kampung KB Program is the entire community in the area, starting from toddlers, teenagers, the elderly, couples of childbearing age, and the elderly. Consistency is shown by the existence of 5 programs that are determined based on the target group and already have a routine agenda, but since the Covid 19 Pandemic these programs have now stopped.

Keywords: *Communication, Public Policy, Family Planning Village*

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mendeskripsikan Komunikasi Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Kecamatan Pangungrejo Kelurahan Pangungrejo Kota Pasuruan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi serta dokumentasi dengan informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transmisi antar pelaksana dan kelompok sasaran dilakukan secara langsung melalui pertemuan rutin dan juga tidak langsung via grup What's App grup. Kejelasan dilakukan dengan adanya tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Tujuan program Kampung KB yaitu agar wilayah Kelurahan Pangungrejo yang sebelumnya memiliki citra sebagai wilayah pesisir yang kumuh serta SDM yang lebih rendah dari wilayah lain dapat menjadi lebih baik lagi. Sasaran dalam Program Kampung KB yakni seluruh masyarakat yang ada di wilayah tersebut, mulai dari balita, remaja, lansia, Pasangan Usia Subur (PUS), dan para orang tua. Konsistensi ditunjukkan dengan adanya 5 program yang ditetapkan berdasarkan kelompok sasaran serta sudah memiliki agenda rutin, namun semenjak adanya Pandemi Covid 19 program-program tersebut kini terhenti.

Keywords: *Komunikasi, Kebijakan Publik, Kampung Keluarga Berencana*

1. Pendahuluan

Pertumbuhan penduduk setiap tahunnya akan selalu mengalami perubahan. Indonesia

merupakan negara berkembang dan juga salah satu negara yang memiliki luas wilayah terbesar serta penyumbang presentase populasi penduduk terbanyak di dunia. Berdasarkan data dari survey Biro Sensus Amerika Serikat dan Worldometers mengungkapkan bahwa Indonesia masuk kedalam jajaran negara-negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Indonesia menempati posisi ke-4 setelah China, India, dan Amerika Serikat di atasnya. Sensus Penduduk 2020 mencatat penduduk Indonesia pada data terbaru September 2020 sebanyak 270, 20 juta jiwa. Faktor yang mempengaruhi kepadatan jumlah penduduk ada tiga yaitu kelahiran (natalitas), kematian (mortalitas), dan migrasi (perpindahan).

Dengan semakin besarnya jumlah populasi di Indonesia maka pemerintah Indonesia harus membuat kebijakan sebagai bentuk solusi atas permasalahan penduduk yang ada di tengah masyarakat. Eyestone dalam (Agustino, 2008) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya. Salah satu program unggulan pemerintah dalam mengatasi masalah terkait kependudukan adalah Program Kampung Keluarga Berencana (KB). Program Kampung Keluarga Berencana (KB) mulai direalisasikan di beberapa daerah di seluruh Indonesia pada tahun 2016 berlandaskan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/70/SJ Tanggal 11 Januari 2016 perihal Pencanaan dan Pembentukan Kampung Keluarga Berencana (KB). Pembentukan Kampung Keluarga Berencana (KB) memiliki roadmap yakni pada tahun 2016 akan dibentuk 1 (satu) Kampung Keluarga Berencana (KB) pada tiap kota/ kabupaten, pada tahun 2017 target pembentukan lebih sempit yaitu dibentuk 1 (satu) Kampung Keluarga Berencana (KB) pada tiap kecamatan. Kemudian pada tahun 2018 Kampung Keluarga Berencana (KB) akan dibentuk di setiap desa yang memiliki status desa sangat tertinggal dan tertinggal. Lalu pada tahun 2019 pemerintah akan berfokus pada target pembangunan Kampung Keluarga Berencana (KB) di seluruh desa dengan kriteria yang ditentukan. Apabila target pembentukan hampir tercapai seluruhnya maka pada tahun-tahun berikutnya pemerintah akan berfokus pada pengoptimalisasian keberadaan Program Kampung Keluarga Berencana (KB) itu sendiri bagi masyarakat. Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) adalah dibukanya peluang bagi masyarakat untuk turut serta (Sidik, 2016).

Program Kampung Keluarga Berencana (KB) sudah ada di 34 provinsi di Indonesia, termasuk Provinsi Jawa Timur yang menunjukkan jumlah Kampung Keluarga Berencana (KB) terbaru yakni 1.424. Pembentukan Kampung Keluarga Berencana (KB) di Jawa Timur dimulai awal tahun 2016 sampai 2021 dengan mengalami perubahan setiap tahunnya sesuai roadmap yang telah ditetapkan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2017 hingga 2018 mulai gencar dalam menambah jumlah pembentukan Kampung Keluarga Berencana (KB). Di antara

Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Jawa Timur, Kota Pasuruan menduduki posisi paling sedikit untuk jumlah pembangunan Program Kampung Keluarga Berencana (KB). Berikut merupakan daftar persebaran Kampung Keluarga Berencana (KB) yang ada di Kota Pasuruan tahun 2021;

Tabel 1. 1 Jumlah Kampung KB Kota Pasuruan 2021

No.	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah
1.	Gadingrejo	Gadingrejo	1
2.	Purworejo	Wirogunan	1
3.	Bugulkidul	Kepel	1
4.	Panggungrejo	Panggungrejo	1
TOTAL			4

Sumber; Kelurahan Panggungrejo

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa terdapat 1 Kampung Keluarga Berencana (KB) di tiap kecamatan. Salah satu Kampung Keluarga Berencana (KB) diatas yang menjadi *highlight* dalam penelitian yang akan dilakukan yaitu Kampung Keluarga Berencana (KB) yang berada di Kelurahan Panggungrejo. Kelurahan Panggungrejo termasuk dalam wilayah Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan. Berikut tabel luas wilayah dan jumlah penduduk di Kota Pasuruan;

Tabel 1. 2 Luas Wilayah, Jumlah, dan Kepadatan Penduduk Kota Pasuruan 2020

Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Luas Wilayah (km ²)	Penduduk (ribu) <i>Population</i>	Kepadatan Penduduk <i>Population Density</i>
Gadingrejo	8,27	49.442	5. 978
Purworejo	8,08	62.007	7. 674
Bugulkidul	11,11	31.687	2.852
Panggungrejo	7,83	64.870	8. 285

Sumber; BPS Kota Pasuruan 2020

Berdasarkan tabel 1.2 dapat diketahui bahwa Kecamatan Panggungrejo memiliki luas wilayah paling kecil diantara 3 kecamatan lainnya dan jumlah penduduk yang menempati posisi terbanyak. Kelurahan Panggungrejo merupakan kelurahan yang dipilih oleh pemerintah Kota Pasuruan sebagai wilayah pencahangan Program Kampung Keluarga Berencana (KB) pertama di Kota Pasuruan pada tahun 2016 lalu. Kelurahan Panggungrejo berada di wilayah paling utara Kota Pasuruan. Karena berbatasan langsung dengan laut maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan. Kelurahan Panggungrejo ditetapkan sebagai lokasi Kampung Keluarga Berencana (KB) percontohan Kota Pasuruan karena dari segi wilayah merupakan daerah pesisir dan memenuhi kriteria lain yaitu kumuh dan kawasan miskin perkotaan.

Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Kelurahan Panggungrejo sudah mengalami banyak perubahan setelah 6 tahun diimplementasikan. Program ini telah mengubah kehidupan masyarakat sekitar menjadi lebih baik. Namun apabila ditelusuri lebih

dalam masih terdapat masalah yang masih belum terselesaikan. Penerapan suatu program memerlukan penyebaran informasi yang akurat agar para pelaksana melaksanakan program sesuai dengan target yang ditetapkan. Komunikasi merupakan proses penyebaran informasi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Penyampaian informasi harus secara akurat dan mudah dipahami agar tidak terjadi salah pengertian (EDWARD III, 1980). Kenyataan yang terjadi dalam pelaksanaan program kampung KB beberapa Kader Pokja ternyata masih belum memahami tugas dan kewajiban. Selain itu 3 (tiga) dari 8 (delapan) Pokja yakni bidang agama, sosial budaya, dan kasih sayang tidak menyerahkan buku laporan yang biasanya dikerjakan oleh masing-masing Pokja ketika melakukan sebuah kegiatan ataupun program. Jadwal penyerahan buku laporan ini yaitu di akhir tahun sebagai bentuk pertanggungjawaban dari masing-masing Pokja dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Buku laporan tahunan dinilai penting bagi Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) sebagai bentuk record untuk mengetahui perkembangan yang sudah dicapai oleh Kampung Keluarga Berencana (KB) di Kelurahan Panggungrejo selama setahun terakhir. Namun karena adanya beberapa Pokja yang tidak menyerahkan, maka PLKB mengalami kesulitan akibat ketidak-lengkapan data tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi dan koordinasi yang terjalin pada Pokja bidang agama, social budaya, dan kasih sayang berjalan kurang baik sehingga terdapat keterlambatan penyerahan laporan. Dengan kondisi yang demikian maka perlu diteliti “Urgensi Komunikasi Program Kampung KB di Kelurahan Panggungrejo Kota Pasuruan”.

2. Metode

Penelitian kualitatif adalah prosedur penelelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang diamati (Moleong, 2017). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dengan menggunakan teknik purposive sampling dalam menentukan informan. Lokasi penelitian Kampung Keluarga Berencana (KB) di Kelurahan Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan. Fokus dalam penelitian ini adalah merujuk pada rumusan masalah yaitu urgensi komunikasi Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Kecamatan Panggungrejo Kelurahan Panggungrejo Kota Pasuruan. Key informan dalam pada penelitian ini adalah Lurah Kelurahan Panggungrejo karena data data yang terkait dengan komunikasi dalam implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Kecamatan Panggungrejo Kelurahan Panggungrejo Kota Pasuruan diperoleh dari key informan tersebut. Penelitian ini juga melibatkan beberapa

informan yakni PLKB Kelurahan Panggungrejo, Ketua Pokja Kelurahan Panggungrejo, serta dua warga Kelurahan Panggungrejo. Teknik penganalisisan data menggunakan teknik menurut Miles dan Huberman yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2013).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Program Kampung Keluarga Berencana (KB)

Kampung Keluarga Berencana (KB) adalah salah satu contoh dalam pelaksanaan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dengan melibatkan seluruh bidang yang ada di lingkungan BKKBN serta bekerja sama dengan instansi lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah daerah setempat. Kampung Keluarga Berencana (KB) didirikan di tingkat pemerintah terendah (RT dan RW). Kampung Keluarga Berencana (KB) dirumuskan, dicanangkan, dilaksanakan, dan dievaluasi seluruhnya hanya untuk kepentingan dari masyarakat Kampung Keluarga Berencana (KB). Pemerintah dan stakeholders terkait hanya sebagai alat pendukung dalam hal pelaksanaan Kampung Keluarga Berencana (KB). Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan ketahanan ekonomi keluarga (Sawitri et al., 2021).

Ujung tombak pengelola KB di lapangan merupakan peran Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB). PLKB bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam memberikan berbagai penyuluhan Program KB. PLKB memiliki peran dan tugas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai berikut;

a. Perencanaan

PLKB dalam bidang perencanaan bertugas meliputi penguasaan potensi wilayah kerja sejak pengumpulan data, analisa penentuan masalah prioritas, penyusunan rencana kerja dan memfasilitasi penyusunan jadwal kegiatan tingkat RT, RW dan desa atau kelurahan. PLKB juga punya peran dalam memperkuat peran dari setiap anggota masyarakat untuk menggunakan KB sesuai dengan arahan kebijakan yang ada. Hal tersebut dipertimbangkan dengan melihat perkembangan data jumlah masyarakat yang merupakan pasangan produktif dalam kawasan tertentu.

b. Pengorganisasian

Tugas PLKB dibidang pengorganisasian meliputi memperluas pengetahuan dan wawasan program rekrutmen kader. PLKB diharapkan dapat membentuk kader, memberikan pelatihan atau orientasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kader, memfasilitasi dan memberikan kesempatan yang lebih besar kepada kader untuk

berperan sampai dengan pengembangan kemitraan dan jaringan kerja dengan berbagai instansi yang ada.

c. Pelaksana dan Pengelola Program

Tugas PLKB sebagai pelaksana dan pengelola melakukan berbagai kegiatan mulai penyiapan IMP (Institusi Masyarakat Pedesaan) dan mitra kerja lainnya dalam melaksanakan program, memfasilitasi peran IMP dan mitra lainnya penyiapan dukungan untuk terselenggaranya program KB nasional di desa atau kelurahan serta advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) atau konseling maupun pemberian pelayanan program KB (KB-KR) dan program KS-PK.

d. Pengembangan

Melaksanakan pengembangan kemampuan teknis IMP dan mitra lainnya dalam menyelenggarakan Program KB Nasional.

e. Evaluasi dan Pelaporan

Melakukan evaluasi dan pelaporan akan program sesuai dengan sistem pelaporan yang telah ditentukan secara berkala.

Para pelaksana kebijakan yang mana disini yakni PLKB mengandeng elemen dari masyarakat dalam melaksanakan Program Kampung KB. PLKB membutuhkan bantuan dalam hal pendekatan kepada masyarakat agar program yang ada dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) dengan kader dari masyarakat Kelurahan Panggungrejo sendiri. Sama halnya dengan PLKB, Pokja memiliki tugas dan peran beserta fungsi dalam menjalankan amanat. Berikut tugas Pokja dalam Program Kampung KB;

- a. Perencana strategi advokasi
- b. Pelaksana kegiatan advokasi KB
- c. Pelaksana kegiatan Kampung Keluarga Berencana

Pokja sebagai forum lintas sektor diharapkan memiliki kesamaan persepsi tentang penduduk sebagai subjek dan objek pembangunan bangsa, serta keluarga sebagai pondasi pertama dan utama dalam upaya perubahan bangsa. Dengan demikian perlu untuk melakukan advokasi terhadap para pemegang kebijakan tentang pentingnya pengelolaan program KKBPK sebagai salah satu penentu tercapainya program pembangunan sektor lain maupun pembangunan wilayah. Dengan adanya Pokja diharapkan nantinya dapat;

- a. Menyelaraskan kebijakan dan kegiatan di masing-masing OPD untuk
- b. Kampung Keluarga Berencana
- c. Memfasilitasi terselenggaranya program KKBPK yang terintegrasi dengan program lintas sektor di Kampung Keluarga Berencana

- d. Memotivasi lintas sektor dan masyarakat untuk melakukan perubahan secara bersama-sama menuju masyarakat sejahtera
- e. Membina dan mengevaluasi pelaksanaan integrasi program KKBPK dengan program lainnya dalam kerangka pembangunan wilayah dan masyarakat Kampung.

Temuan di atas sebagaimana diungkapkan dalam (Asrar et al., 2020) bahwa dengan adanya kelompok kerja (POKJA) menjadikan struktur birokrasi tidak terlalu rumit dan berbelit-belit. Kegiatan-kegiatan yang di laksanakan di lapangan langsung di tangani oleh POKJA selain itu POKJA juga terdiri dari beberapa seksi dan membuat kegiatan-kegiatan berjalan dengan lancar.

3.2 Komunikasi dalam Program Kampung KB di Kelurahan Panggungrejo Kota Pasuruan

Komunikasi dalam suatu implementasi kebijakan menentukan keberhasilan program yang sedang dijalankan, komunikasi para pelaksana kebijakan sangat berperan dalam mengajak kelompok sasaran untuk menjalankan program kebijakan yang sedang diamanatkan. Menurut Laswell (Muhammad, 2014) bahwa komunikasi itu merupakan jawaban terhadap “who says what in which medium to whom with what effect”. Komunikasi berperan penting untuk menjelaskan kepada para kelompok sasaran mengenai tujuan program kebijakan yang dijalankan beserta dengan manfaat yang akan diberikan. Dalam melakukan komunikasi para pelaksana harus memperhatikan apakah maksud dan tujuan yang disampaikan dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh para kelompok sasaran. Terdapat tiga aspek dalam mengukur keberhasilan komunikasi dalam sebuah kebijakan (Widodo, 2021). Menurut (EDWARD III, 1980) mengemukakan tugas aspek pengukur keberhasilan dalam indikator komunikasi yakni transmisi, kejelasan, dan konsistensi.

A. Transmisi

Transmisi dapat diartikan sebagai proses penyampaian yang bagus akan memberikan dampak yang bagus pula dalam pengimplementasian kebijakan publik. Edward III dalam (Winarno, 2016) menyatakan bahwa transmisi dalam dimensi komunikasi memiliki pengertian agar informasi mengenai kebijakan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan namun juga kepada masyarakat. Hasil temuan yang ada di lapangan menunjukkan bahwa pada awal pembentukan Kampung KB cara PLKB Kelurahan Panggungrejo untuk memberitahu bahwa akan dicanangkan Kampung KB mulanya dengan mengundang tokoh masyarakat setempat yakni seperti RT, RW, serta Lurah Panggungrejo untuk disosialisasikan di kantor PLKB terkait pencanangan tersebut. Pada saat pendirian Kampung KB dibentuk pula struktur organisasi Kelompok Kerja (Pokja) yang bertugas sebagai perpanjangan tangan

pemerintah ke masyarakat. Program Kampung Keluarga Berencana (KB) dalam mentransmisikan informasi di antara para pelaksana melalui pertemuan rutin satu bulan sekali untuk para kader Pokja Kampung KB Kelurahan Panggungrejo. Senada dalam (Rejbiani et al., 2014) yang mengatakan bahwa dengan adanya rapat rutin terjalin hubungan yang sangat erat dan tidak menyebabkan kurangnya komunikasi.

Proses transmisi juga dapat dilakukan secara online yakni via What's App pada grup Pokja Kampung KB Kelurahan Panggungrejo. Penyampaian informasi melalui Whats App dilakukan oleh Lurah Panggungrejo selaku pelindung dan penanggungjawab Pokja Kampung KB Kelurahan Panggungrejo terkait persiapan akan kedatangan BKKBN Provinsi dalam rangka monitoring dan evaluasi yang pengelolaan Kampung KB. Ketua Pokja Kampung KB Kelurahan Panggungrejo juga menyampaikan pembagian tugas untuk persiapan monev kepada para kader Pokja melalui grup What's App Pokja Kampung KB Kelurahan Panggungrejo. Temuan ini menunjukkan bahwa media massa dapat mempermudah koordinasi dalam pelaksanaan suatu program sebagaimana pendapat (Devito, 2011) bahwa komunikasi massa menekankan unsur-unsur yang terlibat dalam tindakan komunikasi dan mengkaitkannya dengan operasional media massa.

Para pelaksana dalam mentransmisi informasi ke masyarakat menggunakan kader pokja sebagai ujung tombak untuk menyampaikan program serta kegiatan kepada masyarakat setempat. Proses penyampaian informasi yakni Pokja yang ada di tiap RT mengumpulkan orang-orang atau dari rumah ke rumah yang ada di wilayahnya masing-masing. Penyampaian informasi yang dilakukan oleh kader pokja dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1. Transmisi Informasi Program Kampung KB Kelurahan Panggungrejo (Sumber; Diolah Oleh Penulis 2022)

Hasil penelitian ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hidayah & Latifah, 2018) bahwa dalam aspek transmisi di antara para pelaksana dilakukan dengan pertemuan

rutin kader dalam kurun waktu tertentu pembahasan mengenai sosialisasi, pemberian arahan, penjelasan mengenai pelaksanaan program, serta pelaporan hasil pelaksanaan program Kampung KB.

B. Kejelasan Informasi

Kejelasan informasi untuk para pelaksana yaitu berupa tujuan dan sasaran program yang jelas (Winarno, 2016). Kebijakan akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan (Pekuwali et al., 2017). Kejelasan informasi bertumpu pada arahan dari PLKB Kelurahan Pangungrejo dan penyuluhan yang diadakan oleh DP3AKB Kota Pasuruan sebagai guide bagi para pelaksana. Dengan adanya arahan yang jelas maka para pelaksana yang ada di Kampung KB Kelurahan Pangungrejo mengerti mengenai tujuan dan sasaran program yang ada.

Tujuan dari pembentukan Kampung KB yakni agar wilayah Kelurahan Pangungrejo yang sebelumnya memiliki citra sebagai wilayah pesisir yang kumuh serta SDM yang lebih rendah dari wilayah lain dapat menjadi lebih baik lagi. Hal tersebut menjadi tujuan utama dari adanya program ini, kemudian selain hal tersebut target yang disampaikan oleh PLKB Kelurahan Pangungrejo yakni terkait adanya peningkatan keikutsertaan dalam ber-KB dan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) juga ikut meningkat. Tujuan dan sasaran program wajib diketahui dan dipahami oleh seluruh para pelaksana kebijakan dalam penelitian ini yakni Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan juga seluruh para kader Pokja yang ada di Kampung KB Kelurahan Pangungrejo. Pemahaman tersebut bertujuan agar dapat mencapai keberhasilan yang diinginkan. Berikut tabel tujuan dan sasaran Program Kampung Keluarga Berencana (KB);

Tabel 1.3 Tujuan dan Sasaran Program Kampung Keluarga Berencana (KB)

TUJUAN	SASARAN	
	LANGSUNG	TIDAK LANGSUNG
Pelayanan dasar dan program KKBPK	Pasangan Usia Subur (PUS)	Tokoh Agama/ Masyarakat/ Adat
Penguatan 8 fungsi keluarga	Balita	Organisasi Masyarakat
Partisipasi pengguna Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Remaja	Penyedia Layanan Kesehatan
Pembangunan yang terintegrasi lintas sektor	Lansia	

Sumber; Diolah Oleh Penulis, 2022

Tabel 1.4 Peserta KB Aktif Kelurahan Panggungrejo

Alat Kontrasepsi	2019	2020	2021
IUD	8	8	9
MOW	24	24	24
MOP	0	0	0
KONDOM	2	2	2
IMPLAN	66	74	77
SUNTIK	338	339	344
PIL	30	30	30
JUMLAH	468	477	486

Sumber; Sekretariat Kampung KB Kelurahan Panggungrejo, 2022

Berdasarkan data tabel 1.3 dapat diketahui bahwa salah satu tujuan dari Program Kampung KB yakni meningkatkan pengguna Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Namun berdasarkan data peserta KB aktif pada tabel 1.4 diketahui bahwa masyarakat yang ada di Kelurahan Panggungrejo mayoritas masih menggunakan metode kontrasepsi jangka pendek seperti suntik dan pil. Hal tersebut dikarenakan pada sisi masyarakat adanya isu-isu miring yang beredar di tengah masyarakat mengenai penggunaan MKJP yang pada akhirnya membuat peminat dari metode kontrasepsi ini masih sedikit. Menurut (Andhiki et al., 2020) faktor budaya juga menjadi tantangan rendahnya capaian MKJP. Hasil serupa juga terjadi di Kota Padang, bahwa rendahnya minat masyarakat dalam berpartisipasi menjadi kendala pelaksanaan Program Kampung KB (Rahman & Indrawadi, 2019).

Selain itu fasilitas kesehatan yang ada di sekitar wilayah Kampung KB di Kelurahan Panggungrejo juga tidak memadai perihal pemasangan alat kontrasepsi MKJP, fasilitas kesehatan terdekat merupakan Pustu dan hanya memberikan pelayanan kesehatan pemasangan alat kontrasepsi ringan atau jangka pendek seperti suntik dan pil saja. Mengingat pada (Saputra & Widiyarta, 2021) apabila pelayanan yang diberikan dirasa efektif, maka tingkat kepuasan masyarakat pun akan meningkat. Karenanya masyarakat Kelurahan Panggungrejo lebih cenderung menggunakan metode kontrasepsi jangka pendek seperti pil KB dan suntik KB.

Kejelasan informasi mengenai Program Kampung KB di Kelurahan Panggungrejo sudah dimengerti masyarakat. Mayoritas masyarakat sudah mengetahui bahwa Kelurahan Panggungrejo merupakan salah satu Kampung KB melalui pembangunan gapura atau plakat sebagai identitas. Selain itu pengetahuan masyarakat tentang Kampung KB Kelurahan Panggungrejo dipengaruhi adanya kegiatan penyuluhan. Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam penelitian (Bachtiyar & Wibawani, 2017) bahwa program Kampung KB bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan.

Sasaran dalam Program Kampung KB yakni seluruh masyarakat yang ada di wilayah tersebut, mulai dari balita, remaja, lansia, Pasangan Usia Subur (PUS), dan para orang tua. Program pada Kampung KB juga disesuaikan pada kelompok sasaran yang ada. PLKB beserta Pokja mengerti dan paham betul terkait dengan tujuan dan sasaran yang ada di Kampung KB Kelurahan Panggungrejo. Pada respon masyarakat ditemui terkait dengan kejelasan informasi dapat diketahui bahwa mereka sudah paham adanya Kampung KB di wilayah mereka. Masyarakat sadar akan perubahan yang terjadi dengan adanya Kampung KB di Kelurahan Panggungrejo, dengan diadakannya program-program serta penyuluhan membuat pengetahuan masyarakat bertambah mengenai Kampung KB.

Secara garis besar pemahaman masyarakat sudah ada, meskipun pemahaman terkait Program Kampung KB tidak terperinci namun arti esensial dari dibentuknya Kampung KB sudah dipahami masyarakat. Dalam hal ini tidak terperinci berdasarkan hasil temuan peneliti masyarakat hanya menegetahui program yang pernah mereka ikuti atau salah satu anggota keluarga mereka, untuk program lain mereka hanya mengetahui pemahaman sekilas. Informasi yang diberikan oleh pelaksana sudah cukup jelas bagi masyarakat. Hasil penelitian ini serupa dengan penelitian yang dilakukan (Hidayah & Latifah, 2018). Dalam memberikan kejelasan informasi kepada masyarakat para pelaksana melakukan kegiatan penyuluhan yang pembahasannya berkaitan dengan Program Kampung KB.

C. Konsistensi

Konsistensi informasi dibutuhkan dalam penerapan kebijakan agar pelaksana kebijakan dapat melakukannya secara tepat. Menurut Edward III (Widodo, 2021) konsisten yang dimaksud dalam proses komunikasi yakni bersifat tetap sehingga kegiatan dan komunikasi yang diberikan tidak berubah-ubah agar pelaksana kebijakan mampu melaksanakan secara tepat. Konsistensi informasi sangat penting agar kelompok sasaran tidak mengalami pemahaman ganda terkait informasi yang diberikan. Konsistensi informasi yang diberikan yakni dengan adanya 5 program yang ada berdasarkan kelompok sasaran, kelima program tersebut yakni;

- a. Bina Keluarga Balita (BKB) "Dahlia"; kegiatan yang dilakukan yakni posyandu balita dan PAUD Dahlia
- b. Bina Keluarga Remaja (BKR) "Seroja"; kegiatan yang dilakukan berupa penyuluhan mengenai tumbuh kembang remaja,
- c. Bina Keluarga Lansia (BKL) "Kepiting"; kegiatan yang dilakukan yakni posyandu lansia

- d. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) “Mawar”; kegiatan yang dilakukan yakni pembuatan produk makanan kerupuk ikan yang dipasarkan ketika ada *event* dan juga melalui *website* UPPKS Kota Pasuruan,
- e. Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) “Satria”; kegiatan yang dilakukan terkait dengan bakti sosial dan penyuluhan tentang remaja.

Kelima Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Kelurahan Pangunggrejo dapat diidentifikasi jadwal pelaksanaannya pada tabel berikut:

Tabel 1.5 Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Kelurahan Pangunggrejo

Program	Waktu Pelaksanaan
Bina Keluarga Balita (BKB) “Dahlia” Sasaran; Balita	Hari Senin minggu ke-4 setiap bulan
Bina Keluarga Remaja (BKR) “Seroja” Sasaran; Keluarga yang memiliki remaja	Hari Kamis minggu ke-3 setiap bulan
Bina Keluarga Lansia (BKL) “Kepiting” Sasaran; Lansia	Hari Kamis minggu ke-3 setiap bulan
Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) “Mawar” Sasaran; Perempuan dan Ibu Rumah Tangga	Jika ada event pameran -
Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) “Satria” Sasaran; Remaja	Hari Minggu pada minggu ke-3 setiap bulan

Sumber; Sekretariat Kampung KB Kelurahan Pangunggrejo, 2022

Berdasarkan tabel 1.5 dapat diketahui bahwa program Kampung KB Kelurahan Pangunggrejo dikelompokkan sesuai dengan sasaran kelompok usia masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Lalu apabila terdapat kegiatan lain yang membutuhkan bantuan dari lintas sektor maka oleh para pelaksana akan mengajukan ke badan terkait. (Bachtiyar & Wibawani, 2017) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa koordinasi yang baik antar pihak menyebabkan baiknya kualitas hubungan interorganisasional dalam pengimplementasian program.

Para pelaksana juga mengadakan pertemuan rutin kader Pokja Kampung Kelurahan Pangunggrejo yang dilakukan rutin satu bulan sekali. Sebelumnya program-program tersebut sudah dijalankan berdasarkan waktu pelaksanaan yang sudah disepakati dan ditentukan oleh para pelaksana, namun semenjak pandemi pada tahun 2020 kegiatan yang ada berhenti total hingga saat ini. Untuk konsistensi dari setiap program yang ada di Kampung Keluarga Berencana (KB) di Kelurahan Pangunggrejo sudah ditetapkan dan tidak berubah. Perubahan yang ada dikarenakan dampak dari Pandemi *Covid 19* yang berdampak pada terhentinya seluruh program yang sudah ada di Kampung KB Kelurahan Pangunggrejo ini. Hasil serupa terjadi di Sulawesi Selatan, (Jamaluddin et al., 2021) menjelaskan bahwa situasi pandemic

Covid-19 menjadi hambatan dalam pelaksanaan kampung KB yang menjadikan kegiatan pelatihan dan sosialisasi rutin terhenti. Hubungan untuk melakukan kolaborasi tersebut dapat dilakukan dengan menciptakan pertemuan rutin yang bertujuan untuk memperkuat pengelolaan kelembagaan pada isu yang ada (Hariyoko et al., 2021). Proses kolaborasi kampung KB mempunyai kebutuhan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan menjaga keluarga-keluarga tersebut memiliki arah yang jelas.

4. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan uraian terkait dengan Urgensi Komunikasi Program Kampung KB di Kelurahan Panggungrejo Kota Pasuruan dapat disimpulkan bahwa para pelaksana kebijakan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat kelompok sasaran sudah memaksimalkan usahanya. Pada aspek 1) Transmisi, penyampaian informasi secara langsung dan juga tidak langsung baik dari sisi antar pelaksana dan juga pelaksana kebijakan kepada kelompok sasaran; 2) Kejelasan, yakni berupa kejelasan adanya tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh Kampung KB yang ada di Kelurahan Panggungrejo, meski sudah cukup baik namun berdasarkan hasil wawancara terdapat satu tujuan yang sampai saat ini masih terus diusahakan oleh para pelaksana yakni meningkatnya jumlah pengguna Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP); 3) Konsistensi, yakni adanya 5 program yang ditetapkan berdasarkan kelompok sasaran serta sudah memiliki waktu yang sudah ditetapkan, namun semenjak adanya Pandemi Covid 19 program-program tersebut kini terhenti.

5. Referensi

- Agustino, L. (2008). Dasar-dasar kebijakan publik. *Bandung: Alfabeta*.
- Andhiki, S. S., Trisnantoro, L., & Sulistyono, D. H. (2020). EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI DI KAMPUNG KB KABUPATEN: STUDI KASUS KECAMATAN. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan (The Indonesian Journal of Health Service Management)*, 23(04), 120–126.
- Asrar, M. A., Parawangi, A., & Azikin, R. (2020). Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Pelaksanaan Program Kampung KB di Desa Lipukasi Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 1(1), 101–114.
- Bachtiyar, N. A., & Wibawani, S. (2017). Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana Di Dusun Ambeng-Ambeng Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 7(1).
- Devito, J. A. (2011). *Komunikasi Antar Manusia*. Tangerang. Karisma Publishing Group.
- EDWARD III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
- Hariyoko, Y., Biadi, E. P., & Susiantoro, A. (2021). Pengembangan Objek Wisata Kabupaten Mojokerto Dengan Pendekatan Collaborative Governance (Studi Kasus Pemandian Air Panas Pacet). *GOVERNANCE: Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 11(1).
- Hidayah, S. N., & Latifah, U. (2018). Implementasi Program Kampung Kb Sebagai Inovasi Strategis Pencegahan 4T (4 Terlalu) Dalam Kehamilan Di RW 10 Margadana, Tegal. *Jurnal Kebidanan*, 8(2), 130–138.
- Jamaluddin, Z., Ilham, M., & Madjid, U. (2021). IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG KELUARGA

BERENCANA (KB) DI KELURAHAN DANGERAKKO KECAMATAN WARU KOTA PALOPO PROVINSI SULAWESI SELATAN. *VISIONER: Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, 13(2), 351–362.

- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*, cetakan ke-36, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Muhammad, A. (2014). *Komunikasi Organisasi*. PT. Bumi Aksara.
- Pekuwali, P., Indartuti, E., & Zakariya, Z. (2017). IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TERHADAP KELUARGA SANGAT MISKIN (KSM) PENERIMA BANTUAN (STUDI DI KECAMATAN RINDI KABUPATEN SUMBA TIMUR). *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 3(2). <https://doi.org/10.30996/jpap.v3i2.1267>
- Rahman, H. M., & Indrawadi, J. (2019). Implementasi Program Kampung KB dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara Kota Padang. *Journal of Civic Education*, 2(3), 295–301.
- Rejbiani, A. G., Hakim, L., & Azijah, D. N. (2014). Implementasi Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) di Desa Sukadaya Kabupaten Bekasi Alifya. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 7(1).
- Saputra, D. P., & Widiyarta, A. (2021). Efektivitas Program SIPRAJA Sebagai Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 7(2).
- Sawitri, E., Hidayat, R., & Ajizah, D. N. (2021). Evaluasi Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Desa Tambaksari, Tirtajaya, Karawang. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 7(1).
- Sidik, S. (2016). IMPLEMENTASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (Studi tentang Musrenbang di Kabupaten Sumenep). *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 2(01). <https://doi.org/10.30996/jpap.v2i01.710>
- Sugiyono, Prof. Dr. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif dan R and D*. In Bandung: Alfabeta (Issue April).
- Widodo, J. (2021). Analisis Kebijakan Publik: Konsep, dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik. In Malang: Bayu Media.
- Winarno, B. (2016). *Teori, Proses, Dan Studi Kasus Kebijakan Publik Edisi & Revisi Terbaru*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.